

Sekda La Ode Harwanto Sebut Pemkab Buton Selatan Bahas Reformulasi Pola Kerja Paruh Waktu, WFH Dua Hari Jadi Opsi



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, DT Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) tengah merumuskan ulang pola kerja tenaga paruh waktu sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan kondisi anggaran yang masih terbatas. Kajian tersebut menjadi perhatian serius Pemda karena menyangkut efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi sumber daya manusia.

Pembahasan skema baru ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang memengaruhi sejumlah kegiatan pemerintah daerah. Pemangkas pos belanja membuat sebagian program

Lanjut ke Hal: 7

Gerakan Indonesia Asri Dimulai Usai Instruksi Presiden Prabowo, Sultra Prioritaskan Penataan Reklame dan Kabel



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung menyiapkan langkah penertiban reklame dan jaringan kabel usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana Gerakan Indonesia Asri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul

International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Arahan tersebut menjadi urgensi baru bagi daerah dalam memperbaiki estetika kota dan ketertiban ruang publik.

Gerakan Indonesia Asri, yang mengusung konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah, menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk membangun lingkungan

perkotaan yang lebih tertib dan nyaman. Program seperti ini sebelumnya pernah dijalankan pada masa Orde Baru melalui Gerakan Kebersihan Lingkungan pada tahun 1980-an, serta mengadopsi praktik internasional seperti kampanye “Clean City Initiative” di Singapura dan “Beautiful Japan Movement” di era

Lanjut ke Hal: 7

Pengamanan Aset, Selesaikan RUP, Penataan OPD hingga Seragam ASN di Awal Februari 2026, Ini Arahan Sekda Baubau La Ode Darussalam



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmen percepatan program pembangunan dan penataan organisasi pada awal Februari 2026. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Wali Kota Bau-

bau, Palagimata, Senin (02/02/2026).

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa sejumlah agenda strategis harus segera dijalankan memasuki bulan kedua tahun anggaran. Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat daerah untuk mengawal roda pemerintahan agar berjalan efektif dan tepat waktu.

Isu penataan pas-

ca-merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan awal Sekda. Ia meminta agar seluruh instansi dapat menyelaraskan tugas baru, termasuk mengamankan berbagai aset negara yang kini tidak lagi difungsikan setelah penggabungan kelembagaan. “Aset negara harus tetap dipelihara dan dijaga, tanpa pengecualian,” tegasnya.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) menggelar pasar murah sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Program ini menjadi bagian dari upaya daerah memastikan pasokan pangan tetap aman di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Kegiatan pasar murah

tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat naiknya harga sejumlah komoditas biasanya terjadi pada periode pra-Ramadan. Kondisi ini juga tercatat secara nasional sejak beberapa tahun terakhir, ketika permintaan pangan meningkat dan distribusi pasokan mengalami keterlambatan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan tren nasional sejak 2019. Fenomena serupa

juga terjadi di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Mesir, Turki, dan Pakistan, yang mengalami inflasi pangan musiman sebelum bulan puasa.

Berangkat dari kondisi historis itulah, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menginstruksikan jajarannya mempercepat langkah antisipatif. Dinas Ketahanan Pangan kemudian bergerak cepat melakukan koordinasi lintas lembaga untuk me-

Lanjut ke Hal: 7

Sekda La Ode Harwanto Sebut Pemkab Buton Selatan Bahas Reformulasi Pola Kerja Paruh Waktu, WFH Dua Hari Jadi Opsi

tidak dapat dijalankan sepenuhnya, sehingga pengaturan ulang pola kehadiran tenaga paruh waktu menjadi salah satu opsi penataan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa tenaga paruh waktu memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penataan pola kerja mereka harus mempertimbangkan kebutuhan lapangan. “Tenaga mereka sangat dibutuhkan secara langsung, apalagi pembangunan kita masih harus dipercepat,” ujarnya.

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan mekanisme work from home (WFH) secara terbatas, maksimal dua hari dalam sepekan. Namun, Sekda menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan dilakukan tanpa pengawasan yang ter-

ukur. Ia mengatakan, “Kalau WFH diterapkan, mereka wajib membuat catatan dan laporan kerja yang jelas,” ucapnya.

Menurut Harwanto, Pemkab Busel masih mengombinasikan sejumlah formula yang memungkinkan efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Penentuan jumlah hari kerja tenaga paruh waktu dilakukan dengan menimbang aspek efektivitas, produktivitas, dan kemampuan daerah dalam mendukung operasional pegawai.

Secara regulasi, jam kerja aparatur pada umumnya mengacu pada pola enam hari kerja dalam sepekan berdasarkan aturan nasional. Namun, pemerintah daerah diberi ruang untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi objektif wilayah. “Kami masih menyusun pola paling ideal, berapa hari mereka seharusnya masuk kantor dalam satu minggu,”

terangnya.

Hingga kini, diskusi internal antara Sekda dan Bupati Buton Selatan, H. Muh. Adios, S.Sos., terus dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil nantinya bersifat proporsional. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan anggaran daerah.

Dari sisi historis, kebijakan fleksibilitas kerja di Indonesia mulai dikenal luas setelah pandemi COVID-19 pada 2020. Pemerintah pusat bahkan menerbitkan berbagai regulasi sementara terkait WFH bagi aparatur. Tren serupa juga terjadi di sejumlah negara, seperti Jepang dan Jerman, yang melakukan adaptasi kerja fleksibel demi efisiensi dan keselamatan kerja.

Meski demikian, sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa penerapan WFH tidak selalu cocok untuk daerah yang

membutuhkan percepatan pembangunan dasar. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Busel, mengingat masih banyak sektor layanan yang membutuhkan tenaga langsung di lapangan.

Di Buton Selatan sendiri, kebutuhan tenaga paruh waktu di berbagai sektor pelayanan terbilang tinggi, terutama untuk mendukung administrasi, pelayanan masyarakat, serta kegiatan teknis di kecamatan dan desa. Karena itu, Pemda tetap menekankan bahwa kehadiran fisik tidak boleh lebih sedikit dibandingkan WFH.

Pemerintah daerah berharap, formula akhir yang sedang dibahas dapat menghasilkan aturan yang efektif serta memberi kepastian kerja bagi para tenaga paruh waktu. Secara bertahap, kebijakan tersebut akan ditetapkan setelah seluruh aspek teknis dan administratif selesai dirumuskan. (*)

Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP

mastikan pelaksanaan pasar murah dapat berjalan sebelum puncak kenaikan harga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Buton Selatan LM Idris, SP, MM mengungkapkan bahwa pihaknya segera berkomunikasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan dukungan operasional. “Proposal langsung kami ajukan karena arahan Bupati sangat jelas: pemerintah harus hadir sebelum harga melonjak,” katanya, Senin (2/2/2026).

Respons Bank Indonesia pun dinilai cepat. Dukungan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menggelar program pasar murah sebanyak tiga kali selama Januari hingga menjelang Ramadan. Pelaksanaan perdana dilakukan pada 30 Januari 2026 di wilayah perkotaan Buton Selatan.

Pada kegiatan pertama, pemerintah menyalurkan 3 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), setara 600 karung ukuran 5 kilogram. Selain itu, tersedia 120 kemasan minyak goreng, 100 kilogram gula pasir, serta bawang merah dan bawang putih dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Selisih harga bawang menjadi salah satu komoditas paling menarik

penyalahgunaan fasilitas negara di tengah masa transisi birokrasi tersebut.

Selain urusan penataan organisasi, Sekda juga menyinggung persoalan administrasi teknis terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP). Ia mengingatkan kembali bahwa masih terdapat OPD yang belum menginput data pengadaan. “Kami ingin seluruh OPD menyelesaikan RUP dengan cepat. Jangan ada yang menunda,” katanya dalam arahnya.

Instruksi percepatan RUP tersebut selaras dengan pedoman nasional yang mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan dokumen pengadaan pada awal tahun. Secara historis, sejak diberlakukan sistem e-procurement oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2008, pemerintah daerah diwajibkan mempercepat digitalisasi proses pengadaan sebagai langkah efisiensi dan transparansi.

Perhatian juga diarahkan pada penyempurnaan distribusi pegawai pasca-restrukturisasi OPD. Sekda menerima laporan adanya pegawai yang belum memahami lokasi penempatan barunya, sehingga berpengaruh terhadap absensi. Ia meng-

perhatikan warga. Jika di pasar dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram, maka di pasar murah dipatok Rp37 ribu. “Perbedaannya cukup terasa bagi masyarakat, terutama menjelang Ramadan,” ujar Idris.

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga dari berbagai kecamatan datang lebih awal untuk mengantre sebelum lapak penjualan dibuka. Idris tidak menampik bahwa tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, terlebih dengan adanya potongan harga yang cukup signifikan.

“Animo masyarakat luar biasa. Ini menegaskan bahwa pasar murah masih sangat dibutuhkan sebagai instrumen stabilisasi harga,” ujarnya menambahkan.

Pasar murah berikutnya dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua dan ketiga Februari 2026. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sejak 2022 berperan aktif menekan inflasi di Buton Selatan melalui berbagai intervensi pasar dan penguatan distribusi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama. Namun, tidak ada persyaratan khusus bagi pembeli. Idris menilai kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam menempatkan bantuan pangan sesuai peruntu-

kannya.

“Dalam budaya kita, biasanya yang mampu punya rasa malu jika membeli beras SPHP yang memang diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya memberikan penjelasan.

Pemerintah juga memberikan subsidi khusus untuk dua komoditas, yakni gula pasir dan minyak goreng. Harga gula dari Bulog yang mencapai Rp19.200 per kilogram disubsidi Rp1.200 sehingga dijual Rp18.000 per kilogram. Adapun minyak goreng diberikan dengan harga lebih murah dari pasaran agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.

Sementara itu, total kuota beras SPHP yang direncanakan mencapai 9 ton. Dari jumlah tersebut, baru 3 ton tersalurkan pada tahap pertama. Sisanya akan dibagikan pada dua kegiatan berikutnya sambil menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.

Dengan adanya pasar murah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sepanjang Ramadan. Selain itu, kegiatan dipusatkan di wilayah perkotaan karena keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau seluruh kecamatan.

“Sasaran kami jelas: stabilitas harga harus terjaga, dan masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” tutup Idris. (*)

cuaca ekstrem beberapa waktu lalu juga disampaikan dalam apel tersebut. La Ode Darus Salam menegaskan bahwa kinerja responsif para pegawai harus dipertahankan. “Pimpinan daerah memberikan apresiasi penuh atas kesiapan ASN menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.

Pada bagian lain, Sekda memberikan klarifikasi mengenai aturan pakaian dinas ASN setelah munculnya penyesuaian seragam di tingkat pusat. Berdasarkan konsultasi dengan BKN RI dan Kemenpan RB, ia memastikan bahwa Kota Baubau masih mengacu pada Permendagri Nomor 10. “Belum ada perubahan. Kita tetap mengikuti regulasi yang berlaku,” katanya.

Penegasan aturan tersebut menambah kepastian bagi ASN daerah di tengah tren perubahan seragam Korpri di beberapa kementerian. Secara historis, kebijakan uniform ASN di Indonesia selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika birokrasi nasional, mulai dari penguatan identitas pada era 1970-an hingga digitalisasi atribut kepegawaian secara global pada dekade terakhir.

Pemerintah Kota Baubau berharap langkah percepatan program, penataan organisasi, serta penegakan disiplin dapat menjadi fondasi pembangunan sepanjang 2026. Sinergi antar-OPD disebut menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

Gerakan Indonesia Asri Dimulai Usai Instruksi Presiden Prabowo, Sultra Prioritaskan Penataan Reklame dan Kabel

2000-an.

Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangeruka menindaklanjuti instruksi tersebut dengan segera mengarahkan jajarannya agar berkomunikasi dengan pengusaha dan pihak-pihak terkait reklame maupun infrastruktur kabel. Ia menegaskan bahwa aspek estetika dan kerapian kota bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi tanggung jawab nasional dalam memperbaiki wajah Indonesia di mata dunia.

“Kita mendukung penuh Gerakan Indonesia Asri yang diinisiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah meminta jajaran untuk bersurat kepada perusahaan pemilik spanduk, baliho, hingga pengelola kabel listrik dan telekomunikasi agar segera menertibkan pemasangan yang tidak sesuai aturan,” ujar Gubernur di sela Rakornas.

Instruksi cepat Gubernur juga mencerminkan perubahan pendekatan pemer-

intah daerah dalam menjawab arahan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kota di Indonesia berupaya menata ulang reklame menyusul pengalaman buruk sebelumnya, seperti semrawutnya kabel dan baliho di Jakarta pada awal 2000-an sebelum diberlakukannya penataan terpadu oleh Pemprov DKI.

Presiden Prabowo sendiri menyoroti persoalan tersebut karena dinilai mengganggu keindahan tata ruang dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. “Saya meminta pemerintah tolong tertibkan iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Turis datang tidak mau lihat spanduk,” tegas Presiden dalam arahannya di Rakornas.

Selain reklame, kondisi kabel listrik dan jaringan telekomunikasi yang berse-liweran juga menjadi perhatian khusus. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan sebagian

besar negara Eropa telah menurunkan kabel ke bawah tanah selama dua dekade terakhir demi keamanan dan estetika. Indonesia disebut perlu mengejar ketertinggalan tersebut.

Gubernur Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Sultra akan segera dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program. “Kami tidak ingin penataan ini hanya bersifat seremonial. Semua kepala daerah wajib mengakselerasi implementasinya secara konkret di lapangan,” tandasnya.

Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa langkah penerbitan tidak akan dilaksanakan secara sepihak. Dialog dengan pelaku usaha, pemilik reklame, serta operator jaringan akan ditempuh agar pelaksanaan program berjalan tertib dan tidak menimbulkan sengketa.

Selain itu, Sultra menargetkan penerapan zona bebas

reklame di sejumlah kawasan strategis, seperti pusat pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan area wisata. Langkah ini mengikuti contoh kota-kota dunia seperti Paris dan Kyoto yang telah melarang pemasangan reklame komersial di zona bersejarah.

Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan estetika lingkungan. Pemerintah menilai Gerakan Indonesia Asri tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan publik dalam mengawasi dan menjaga ruang-ruang kota dari pemasangan reklame ilegal atau kabel yang tidak tertata.

Dengan langkah-langkah yang dicanangkan tersebut, pemerintah berharap Sultra dapat menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih bersih dan indah sebagai bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Asri tahun 2026. (*)

Pengamanan Aset, Selesaikan RUP, Penataan OPD hingga Seragam ASN di Awal Februari 2026, Ini Arahan Sekda Baubau La Ode Darussalam

Sejumlah bangunan seperti eks kantor Dinas Perindustri-

an dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Dispora disebut-

kan perlu diawasi secara ketat. Satpol PP diminta mening-

katkan patroli untuk menghindari potensi kerusakan maupun

Kejagung: Buron Riza Chalid Ada di Negara ASEAN



Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatn

Laporan: Hamid

JAKARTA, BP-Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut keberadaan buron kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Mohammad Riza Chalid (MRC) terdeteksi di salah satu negara Asia Tenggara alias ASEAN.

“Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara wilayah ASEAN,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Supriatna, Selasa (3/2/2026).

Anang belum bisa mengungkapkan negara itu secara spesifik. Ia beralasan pihaknya tengah bekerja sama

dengan Polri untuk melakukan pengejaran.

Di sisi lain, Anang mengatakan penyidik juga tengah menyiapkan upaya ekstradisi untuk memulangkan Riza Chalid ke Indonesia.

Ia menyebut langkah ini menjadi opsi kedua jika negara yang menjadi tempat pelarian Riza Chalid tidak membantu proses penangkapan.

“Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita siap juga timnya, tentu harus kehadiran penyidik. Karena kita sendiri sudah mencabut [paspornya] kan,” tuturnya.

“Yang jelas kita

tinggal menunggu ikhtikad baik dari negara-negara yang diduga lokasi keberadaan MRC di negara tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya Riza Chalid masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sejak 19 Agustus 2025.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara. (*)

PT Jakarta Perberat Vonis Hakim Djuyamto Jadi 12 Tahun dalam Kasus Suap CPO

JAKARTA-- Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menghukum hakim Djuyamto dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sejumlah Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Djuyamto dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya periode Januari-April 2022.

Hakim tingkat banding mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST tanggal 3 Desember 2025 sepanjang mengenai lamanya pidana, pidana penjara pengganti denda, pidana penjara pengganti uang pengganti dan status barang bukti rekening BRI atas nama Terdakwa.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencuk-

upi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari,” bunyi putusan PT Jakarta dikutip Selasa (3/2).

Perkara nomor: 1/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Albertina Ho dengan hakim anggota H. Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Panitera Pengganti Rina Rosanawati. Putusan dibacakan pada Senin, 2 Februari 2026.

Djuyamto dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair.

Dia juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp9.211.864.000,00 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun,” ucap hakim.

Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim juga menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan banding Agam Syarif

Sementara itu, hakim Agam Syarif Baharudin tetap dihukum dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari.

Perkara nomor 2/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang sama. Panitera Wangi Amal Prakasa. Putusan juga dibacakan pada Senin, 2 Februari 2026.

“Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST tanggal 3 Desember 2025 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda,” kata hakim.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Agam berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp6.403.780.000,00 subsider 4 tahun penjara.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap hakim.

Transaksi Judi Online Turun di 2025, PPATK Klaim Tonggak Sejarah Baru

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Upaya pemberantasan judi online di Indonesia memasuki babak baru setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan aktivitas transaksi terkait judi online sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sejarah penting dalam pengawasan keuangan nasional.

Dalam pemaparan kinerja di hadapan Komisi III DPR RI pada Selasa (3/2), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan tahun 2025 sebagai momentum pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi judi online secara signifikan. “Tahun 2025 adalah sejarah



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan transaksi judi online di Indonesia menurun pada 2025. Ilustrasi

baru, dan baru pertama kali Indonesia mampu menurunkan transaksi judi online,” ujarnya.

Meski tidak merinci besaran penurunan, Ivan menegaskan bahwa tren tersebut mencerminkan efektivitas langkah pengawasan lintas lembaga. Ia menuturkan bahwa sinergi dengan aparat

penegak hukum menjadi faktor utama dalam menekan perputaran dana ilegal dari sektor judi daring.

Sepanjang 2025, PPATK menerima 43.723.386 laporan transaksi keuangan, meningkat 25,5 persen dari tahun 2024 yang tercatat 35.650.984 laporan. Lonjakan ini

menandakan makin kuatnya sistem pelaporan sebagai fondasi utama pengawasan keuangan nasional.

Di hari kerja, rata-rata laporan yang masuk mencapai 21.861 laporan per jam. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 17.825 laporan per jam pada

2024. PPATK menilai kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku industri jasa keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan.

Sebagai focal point rezim anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM), PPATK terus memperkuat teknologi analisis data. “Kami harus menjaga integritas sistem keuangan nasional agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal,” kata Ivan.

Selain memproses laporan transaksi, PPATK juga menerbitkan 994 hasil analisis, 17 laporan pemeriksaan, dan 529 informasi yang disampaikan kepada penyidik dan kementerian terkait. Dari berbagai dokumen tersebut, nilai total dana yang dianalisis mencapai Rp2.085 triliun, naik 42 persen dibandingkan tahun

2024.

Tren pemberantasan judi online ini tidak terjadi secara instan. Pada 2023-2024, pemerintah Indonesia menghadapi lonjakan signifikan perputaran dana judi online hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Bahkan secara global, industri judi digital dunia diperkirakan mencapai lebih dari USD 100 miliar pada 2024, menjadikannya salah satu sektor ekonomi gelap yang tumbuh paling cepat.

Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Prancis sebelumnya juga mencatat kesulitan serupa dalam menekan perjudian daring karena sifatnya yang lintas batas dan memanfaatkan teknologi keuangan modern. Oleh karena itu, capaian Indonesia pada 2025 dinilai sebagai langkah penting dalam menyelaraskan upaya nasional dengan standar internasional.

Ivan menegaskan bahwa penurunan

transaksi judi online harus menjadi momentum memperkuat kerja sama global. “Tantangan kita adalah bahwa aktivitas ini bersifat transnasional. Kita harus membangun kolaborasi yang lebih luas” ujarnya.

Ke depan, PPATK menargetkan peningkatan kapasitas intelijen keuangan, termasuk optimalisasi pemantauan aset digital, pelacakan transaksi lintas negara, serta integrasi data antarinstansi sebagai strategi lanjutan untuk menghalau masuknya dana ilegal ke sistem keuangan nasional.

Dengan penurunan transaksi judi online yang dicapai pada 2025, PPATK berharap stabilitas keuangan serta keamanan digital Indonesia dapat semakin terjaga. Pemerintah juga menilai capaian ini sebagai bukti komitmen kuat dalam memerangi kejahatan keuangan yang terus berevolusi. (*)

Linguistik Forensik Jadi Fokus Kerja Sama Kominfo dan UHO



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Upaya menghadirkan kajian ilmiah yang objektif dalam merespons dinamika wacana publik mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menjajaki kolaborasi strategis dengan Balai Bahasa Sultra serta Universitas Halu Oleo (UHO).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa ruang publik saat ini dipenuhi berbagai narasi yang kerap memicu kebisingan informasi, konflik tafsir, hingga potensi disharmoni sosial. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pandangan akademik yang jernih dan berbasis ilmu pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut, Kominfo Sultra menggalas pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas institusi yang akan melibatkan Balai Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya UHO. Pokja ini dirancang menjadi wadah kajian, edukasi publik, serta anal-

isis ilmiah terhadap adap persoalan kebahasaan dan wacana yang berkembang di media massa maupun media sosial.

Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari lingkungan akademik. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO, Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis yang relatif baru dan membuka ruang kontribusi akademik yang lebih luas bagi dunia kampus dalam mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi ini. Selain bermanfaat bagi pengembangan akademik, kerja sama ini juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Dekan Fakultas Hukum UHO, Dr. Guasman Tawu, S.H., M.H. Ia menyatakan bahwa dunia akademik memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam memberi tafsir ilmiah terhadap isu-isu kebahasaan yang kerap bersinggungan dengan perso-

alan hukum.

“Kami siap berkolaborasi. Dalam praktik hukum, tidak selalu terdapat tafsir tunggal, sehingga dialog akademik menjadi sangat penting untuk memahami isu secara lebih komprehensif,” katanya.

Komitmen kerja sama tersebut dibangun melalui rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Plt. Kadis Kominfo Sultra pada akhir Januari 2026. Pada Senin, 27 Januari 2026, Andi Syahrir mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, disusul kunjungan ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya UHO pada Selasa, 28 Januari 2026.

Di Balai Bahasa Sultra, Andi Syahrir disambut langsung oleh Kepala Balai Bahasa, Dewi Pridayanti, bersama jajaran. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam penguatan kebijakan kebahasaan, termasuk pengembangan kajian linguistik forensik.

Dewi Pridayanti menyampaikan bahwa Balai Bahasa Sultra pada prinsipnya sangat terbuka ter-

hadap kerja sama lintas lembaga, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.

Ia bahkan menegaskan bahwa Balai Bahasa Sultra siap memberikan layanan kebahasaan, seperti telaah dokumen, pendampingan bahasa, hingga pelatihan kebahasaan kepada instansi pemerintah tanpa dipungut biaya.

Lebih jauh, Dewi berharap kolaborasi yang terbangun nantinya tidak hanya berfokus pada linguistik forensik, tetapi juga turut mendorong implementasi Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik tersebut, Kominfo Sultra berharap dapat memperkuat kualitas literasi publik serta menghadirkan ekosistem komunikasi yang lebih sehat, rasional, dan berbasis keilmuan di ruang publik digital. (*)

Akselerasi SDM: Sultra Perkuat Dukungan Pembangunan Sekolah Garuda



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Garuda melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi resmi di Gedung D Kementerian Diknas-intek, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memaparkan kesiapan daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan unggulan yang menjadi inti dari Program Sekolah Garuda. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah demi menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya Program Sekolah Garuda karena merupakan kebutuhan masyarakat,” ujar Andi.

Program Sekolah Garuda sendiri merupakan model pendidikan yang menekankan kualitas akademik, karakter, dan pemanfaatan teknologi. Konsep sekolah unggulan semacam ini telah menjadi standar di beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Finlandia, yang sejak dekade 1990-an menerapkan sistem pendidikan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing generasi muda.

Dalam audiensi tersebut, Mendiknas-intek RI Prof. Brian Yuliarto menyambut baik komitmen kuat Pemprov Sultra. Ia

meminta agar pengawasan pembangunan dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program. “Kami berharap Pemprov Sulawesi Tenggara terus memantau keamanan serta pemberdayaan masyarakat lokal selama proses pembangunan berjalan,” kata Brian.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah menyiapkan pembangunan sekolah unggulan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan menjadi titik implementasi Sekolah Garuda di daerah. Pembangunan ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan fasilitas modern, tetapi juga mendorong budaya belajar yang kreatif dan adaptif.

Selain itu, Pemprov Sultra juga menyiapkan empat SMA transformasi yang masuk dalam skema penguatan program tersebut. SMA transformasi diharapkan menjadi pusat pengembangan kualitas akademik yang lebih maju di setiap kabupaten dan kota strategis.

Dukungan provinsi juga diperkuat melalui penyediaan beasiswa gratis bagi mahasiswa berprestasi. Pada tahap awal, Pemprov menetapkan 100 mahasiswa sebagai penerima, dengan target total 1.000 orang dalam beberapa tahun mendatang. Beasiswa ini mencakup pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dalam negeri maupun luar negeri.

Gubernur Andi menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas pembangunan jangka panjang Sulawesi Tenggara. Program beasiswa telah menjadi strategi nasional sejak era

Presiden Soeharto pada awal 1980-an, ketika pemerintah mulai mengirimkan pelajar Indonesia belajar ke Eropa dan Amerika untuk memperkuat kapasitas nasional.

Pemprov Sultra juga memastikan dukungan infrastruktur fisik dengan memfasilitasi pelebaran jalan menuju Sekolah Garuda di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek itu direncanakan mulai dikerjakan pada Maret 2026. “Kami siap mendukung kebutuhan aksesibilitas agar program ini berjalan efektif,” tutur Gubernur.

Selain itu, pemerintah daerah mengulas agar alumni Sekolah Garuda yang telah berhasil nantinya kembali mengabdikan untuk membangun daerah. Konsep ini meniru sistem return service yang telah lama diterapkan di Jepang dan Singapura, di mana lulusan program unggulan diwajibkan berkontribusi kepada negara selama periode tertentu.

Mendiknas-intek Prof. Brian menegaskan bahwa Kementerian akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Sultra untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Ia bahkan menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat. “Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Pertemuan antara keduanya diharapkan menjadi momentum kuat untuk mendorong visi pendidikan unggulan di Sulawesi Tenggara. Dengan sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah, Program Sekolah Garuda diproyeksikan menjadi model pendidikan modern yang mampu melahirkan generasi masa depan yang kompetitif secara nasional maupun global. (*)

Telkom Respons Usulan BTS Buton Utara, Siap Tindaklanjuti Lokasi Blankspot



Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, DT.” Upaya Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) untuk memperluas akses telekomunikasi mendapat respons positif dari PT Telkom Regional V Makassar. Perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya memfasilitasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah titik blankspot yang hingga kini belum mendapatkan layanan jaringan.

Komitmen itu disampaikan dalam dialog resmi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Butur dengan jajaran manajemen Telkom Regional V, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Telkom Makassar, Jumat (30/1/2026). Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak kerja sama jasa jaringan.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Diskominfo Butur dipimpin Kepala Dinas Sartono bersama Kabid TIK, Anas, serta lima staf teknis. Mereka diterima oleh unsur pimpinan Telkom Regional V, termasuk Asisten GM Witel Sulbagsel,

Eri Susanto, dan Asisten GM Regional Large Enterprise and Government Service Reg V, Feronika.

Sebelum penandatanganan kontrak, kedua pihak melakukan diskusi panjang mengenai hambatan pembangunan jaringan di lapangan. Salah satu isu utama adalah banyaknya permintaan masyarakat terkait wilayah blankspot yang belum bisa mengakses layanan telekomunikasi berbasis Telkom.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Butur meminta Telkom mempercepat perluasan jaringan. "Kami berharap Telkom dapat menghadirkan pembangunan BTS di lokasi-lokasi prioritas yang selama ini tidak memiliki akses komunikasi sama sekali," ujar Sartono.

Telkom merespons dengan menyatakan kesiapan melakukan survei teknis. "Semua usulan dari pemerintah daerah kami tampung dan akan kami tindak lanjuti melalui kajian lapangan bersama mitra kami," kata Eri Susanto dalam forum itu. Langkah ini dinilai sebagai komitmen Telkom terhadap pelayanan publik di wilayah kepulauan.

Perusahaan juga meminta agar pengajuan pembangunan jaringan disertai data jumlah penduduk dan fasilitas umum di sekitar lokasi. Menurut pihak Telkom, data tersebut diperlukan sebagai acuan kelayakan pembangunan dan dasar pertimbangan mitra teknis agar proses dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Selain dialog kerja sama, kegiatan itu juga disertai pelatihan Cyber Security yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Pelatihan tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Telkom, yang memberikan materi tentang pengamanan jaringan dari risiko peretasan dan gangguan digital. "Ketahanan siber menjadi kebutuhan semua daerah, termasuk Butur," ujar instruktur dalam sesi pelatihan.

Rangkaian kunjungan ini difasilitasi oleh Zulfikar, Account Manager Telkom Baubau, serta perwakilan mitra Telkom, Nurul Dwi Wahyuningsih. Mereka mendampingi rombongan Diskominfo Butur sejak pemberangkatan dari Kendari hingga kembali ke Buton Utara.

Kebutuhan pembangunan BTS di wilayah blankspot bukan hal baru di Indonesia. Pada 2020-2022, pemer-

intah pusat melalui BAKTI Kominfo membangun lebih dari 4.000 BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

Secara global, pembangunan BTS untuk mengatasi kesenjangan digital juga dilakukan di sejumlah negara berkembang, seperti India dan Bangladesh. Kedua negara itu mempercepat pembangunan menara telekomunikasi sejak awal 2010-an untuk meningkatkan inklusi digital dan memperluas layanan daring ke daerah pedesaan.

Upaya Buton Utara menggendeng Telkom dinilai sejalan dengan tren internasional tersebut, yakni memastikan akses internet menjadi bagian dari pembangunan sosial-ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menegaskan pentingnya konektivitas.

Dengan adanya komitmen dari Telkom Regional V Makassar, pemerintah daerah berharap proses survei dan pembangunan BTS dapat segera dieksekusi guna mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, serta layanan publik lainnya. (*)

4.791 Nelayan Buton Dampingan Rare dalam Penguatan Perikanan Berkelanjutan



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan dan tata kelola perikanan berkelanjutan kembali diperkuat melalui kolaborasi Rare Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Buton. Kerja sama tersebut ditegaskan dalam pertemuan resmi di Ruang Kerja Sekda Buton, Takawa, Senin (2/2/2026), dengan melibatkan jajaran OPD terkait serta tim kebijakan dan kemitraan Rare Indonesia.

Pertemuan itu menegaskan arah pengembangan perikanan berkelanjutan yang menjadi fokus Kabupaten Buton dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah menganggap kolaborasi ini krusial karena wilayah pesisir Buton memiliki potensi tangkapan ikan yang cukup besar dan menyokong ribuan nelayan tradisional.

Menurut data yang disampaikan Rare, program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) telah menjangkau 4.791 nelayan di 7 kecamatan dan 62 desa pesisir. Implementasi program ini meliputi pendampingan kelompok pengelola, pelatihan kapasitas, serta penguatan pencatatan data perikanan secara digital.

Rare Indonesia diwakili Wa Ode Anna Dianna Sastri Chaidir, Senior Manager Policy and Partnership; La Ode Ridwan, Konsultan Penasehat Kebijakan; serta Megawati, Konsultan Kemitraan Desa. Mereka diterima Sekda Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., yang hadir bersama Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bappeda, dan Dinas PMD.

PAAP di Kabupaten Buton mencakup

tujuh kawasan utama, masing-masing dengan karakteristik pesisir yang berbeda. Kawasan Lasalimu bahkan dijadikan proyek percontohan pendanaan Impact Bond sejak 2025, menempatkan Buton sebagai salah satu daerah di Indonesia yang lebih awal mengadopsi pendanaan inovatif untuk pengelolaan perikanan.

Dalam pengelolaan data tangkapan, Rare mencatat penggunaan platform OurFish telah menghasilkan dokumentasi 156 ton ikan sejak 2020 hingga 2025. "Data ini bukan hanya angka, tetapi dasar pengambilan keputusan di tingkat kelompok," ujar Wa Ode Anna. Ia menambahkan bahwa pencatatan digital meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat posisi nelayan kecil.

Sejumlah pelatihan ekonomi dan kelemagaan juga telah diimplementasikan sejak 2021. Rare mencatat 726 nelayan telah dilatih literasi keuangan, 496 orang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dan 18 kelompok simpan pinjam (KSP) aktif dalam mendukung kegiatan usaha perikanan. Pelatihan pengolahan hasil laut seperti pembuatan abon di kawasan Wabula turut menjadi bagian dari program penguatan ekonomi.

Sekda Buton menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik seluruh bentuk kolaborasi yang meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. "Pembangunan Buton memiliki komitmen yang sama dengan Rare Indonesia untuk memajukan kualitas pelaku perikanan," ujarnya. Ia menilai pengalaman Rare dapat memperkuat tata kelola perikanan lokal.

Ia juga menyisingkan keselarasan program PAAP dengan kearifan lokal masyarakat Buton, terma-

suk tradisi 'ombo' di wilayah Dongkala dan Kondowa, yaitu pembukaan kawasan laut sekali setahun untuk panen ikan menjelang upacara adat Kabaria. Tradisi itu dinilai sejalan dengan prinsip konservasi modern, yang di banyak negara kini diterapkan sebagai seasonal fishing closure.

Secara historis, pendekatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat bukan hal baru. Indonesia pernah memperkuat konsep ini melalui program co-management sejak awal 2000-an, sementara dunia internasional menerapkannya sejak 1970-an, termasuk Jepang dengan sistem satoumi dan Filipina dengan community-based coastal management. PAAP dianggap sebagai pengembangan modern dari pendekatan tersebut.

Rare Indonesia juga bekerja sama dengan ITK Buton dan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyusun Buku Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai pedoman pembangunan berbasis kelautan. Dokumen ini dirancang untuk mendukung kebutuhan regulasi daerah sekaligus memastikan terjaganya keberlanjutan sumber daya pesisir.

Harapan besar disampaikan Sekda Buton terhadap dampak kolaborasi ini. "Kami ingin kerja sama ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan lingkungan laut kita" tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah dan masyarakat Buton berterima kasih atas pendampingan yang diberikan Rare.

Kolaborasi Rare Indonesia dan Pemkab Buton diharapkan menjadi model pengelolaan pesisir berbasis data dan kearifan lokal yang dapat direplikasi di daerah pesisir lain di Indonesia maupun level global. (*)

Kemenkes Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata, Perkuat Deteksi Dini Gangguan Penglihatan



Peliput: Warman

JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi menggelar acara “Launching of Improved Access to Eye Health in Indonesia dan Vision Screening Event” sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mata dan menekan angka gangguan penglihatan yang terus meningkat di Indonesia.

Langkah ini dinilai krusial mengingat sekitar 3,6 juta anak Indonesia masih mengalami kelainan refraksi yang belum terkoreksi dengan penggunaan kacamata, kondisi yang berpotensi menghambat tumbuh kembang dan

kualitas hidup anak.

Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa deteksi dini gangguan penglihatan harus dilakukan secara masif dan terintegrasi melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Sepanjang tahun 2025, Kemenkes telah melakukan skrining kesehatan mata terhadap sekitar 55 juta penduduk berusia di atas 7 tahun, dengan hasil temuan sekitar 17 persen di antaranya mengalami gangguan penglihatan.

“Pada tahun 2026, melalui Program Cek Kesehatan Gratis, kami menargetkan skrining terhadap sekitar 140 juta masyarakat Indonesia,

mulai dari bayi hingga lansia,” ujar Nadia.

Upaya penguatan layanan kesehatan mata di Indonesia ini juga mendapat dukungan dari World Health Organization (WHO) melalui inisiatif global SPECS 2030, yang bertujuan mengeliminasi gangguan penglihatan yang dapat dicegah maupun dikoreksi.

Perwakilan WHO Indonesia, Fransiska, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia yang secara resmi bergabung dalam kerangka SPECS sejak Oktober 2025.

Sejalan dengan inisiatif global tersebut, OneSight EssilorLuxottica Foundation menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan Kementerian Keseha-

tan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan mata di Indonesia.

Perwakilan OneSight EssilorLuxottica Foundation, Patricia Koh, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pelatihan tenaga kesehatan, khususnya perawatan, agar memiliki kapasitas melakukan pemeriksaan dasar penglihatan di tingkat layanan kesehatan primer.

Sebagai langkah konkret, program ini juga akan menjangkau wilayah terpencil melalui penyediaan patient center di Kepulauan Seribu, guna memastikan layanan deteksi dini dan kesehatan mata yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)

Tren Influenza A (H3N2) Subclade K di Indonesia Menurun

JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI memastikan situasi influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia dalam kondisi terkendali. Meskipun subclade ini terdeteksi di 13 provinsi, tren kasus influenza secara nasional menunjukkan penurunan memasuki awal tahun 2026.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan virus Influenza H3N2 bukan virus baru dan merupakan bagian dari influenza musiman yang beredar setiap tahun.

“H3N2 merupakan bagian dari influenza musiman. Pertengahan Januari 2025, H3N2 subclade K telah dilaporkan di 80 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama terdeteksi pada M36. Namun berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus influenza di Indonesia telah menurun sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ujar dr. Prima.

Data Kemenkes mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026

terdapat 74 kasus subclade K dari total 204 spesimen influenza A(H3N2) yang diperiksa, dengan temuan terbanyak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-40 tahun 2025 dan terus menurun sejak minggu ke-44. Tdak ada penambahan penemuan kasus A(H3N2) subclade K mulai minggu ke-52.

Sebagian besar pasien influenza mengalami gejala ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kasus berat umumnya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia dan individu dengan penyakit penyerta.

dr. Prima menjelaskan bahwa laporan kematian pada pasien influenza umumnya berkaitan dengan kondisi komorbid yang memperberat penyakit dasar.

Pada kondisi risiko tinggi seperti ini, infeksi dari virus maupun bakteri, dapat menjadi pence-

ruk komorbid yang sudah tidak stabil.

“Influenza tidak selalu menjadi penyebab kematian utama, tetapi dapat menjadi pencetus yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah tidak stabil, terutama pada pasien lansia dengan komorbid,” jelasnya.

Kemenkes terus menjalankan surveilans influenza di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan pintu masuk negara, termasuk pemeriksaan laboratorium dan analisis genom virus, guna memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada karakter virus.

Masyarakat diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat. Vaksinasi influenza tahunan, khususnya bagi kelompok berisiko, juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan.(Lisna)

RS Soeradji Tirtonegoro Klaten Resmi Memulai Layanan Bedah Jantung Terbuka

Peliput: Lisna

RUMAH Sakit Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten resmi memulai layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari upaya peningkatan akses layanan kesehatan lanjutan berteknologi tinggi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan seki-

tarnya.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan untuk penyakit jantung di Indonesia telah mencapai Rp19,7 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya beban penyakit jantung sekaligus menegaskan

urgensi penguatan layanan bedah jantung terbuka, baik untuk kasus kelainan jantung bawaan pada anak maupun penyakit jantung dewasa.

“Tahun 2012, hanya ada 10 rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung terbuka di Indonesia. Sekarang ada 35 rumah

sakit di sekitar 30 provinsi, dan RS Soeradji resmi menjadi yang ke-36” ujar Prof. Dante.

Ia menekankan pentingnya konsistensi mutu dan empati dalam pelaksanaan layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari marwah pelayanan rumah sakit.

Kesehatan RI dalam pemerataan layanan jantung nasional, dengan RS dr. Kariadi Semarang sebagai rumah sakit pengampu regional yang mengalami kesiapan RSST.

Direktur Utama RS dr. Kariadi Semarang, Agus Akhmadi, menegaskan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga penguatan jejaring layanan jantung menjadi prioritas nasional.

“Program jejaring layanan jantung yang diinisiasikan oleh kementerian kesehatan memastikan layanan

yang komprehensif tidak hanya berpusat di rumah sakit besar, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Klaten,” kata Agus.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyambut baik kehadiran layanan ini dan menilai RSST berpotensi mendukung pengembangan wisata medis di Kabupaten Klaten.

“Dengan layanan kesehatan yang semakin lengkap dan akses yang mudah, masyarakat tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya,” ujar Hamenang.(*)

<div>PT FAREN GRAFIKA</div> <div></div> <div>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</div> <div>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</div> <div>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</div> <div>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</div>	<div>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Amat Jr Korlip: Noval Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman</div> <div>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin</div> <div>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</div> <div>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</div> <div>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</div> <div>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</div>	<div>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</div> <div>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</div>
---	--	---

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK



Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden terkait pengangkatan Adies Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Laporan: Alwan

JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden terkait pengangkatan Adies Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Keppres sudah ditandatangani,” kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).

Namun, Pras belum dapat memastikan kapan Adies akan membacakan sumpah sebagai hakim konstitusi.

Adies ditetapkan menjadi Hakim konstitusi menyusul Arief Hidayat

yang memasuki masa pensiun.

DPR melalui Rapat Paripurna pada Selasa (27/1) kemarin menyetujui Adies. Pencalonan Adies ini mengganti Inosentius Samsul yang pada Agustus 2025 lalu juga telah disetujui DPR sebagai pengganti Arief.

Adies sendiri merupakan Wake-tum Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

Proses pencalonan Adies menjadi hakim MK tak lepas dari sorotan. Salah satunya, fit and proper test oleh Komisi III DPR yang digelar secara singkat.

Agenda tersebut juga tak masuk dalam jadwal rapat harian yang dirilis DPR pada Senin (26/1).

Rapat digelar usai Komisi III menggelar dua rapat secara maraton bersama Kapolri dan Komisi Yudisial mulai pukul 9.00 WIB. Usai dua rapat itu, Komisi III langsung menggelar fit and proper test sekaligus pleno penetapan Adies.

Rapat tersebut hanya digelar sekitar 20 menit yang diawali dengan pemaparan makalah sekitar 10 menit oleh Adies, disambung permintaan persetujuan dari delapan fraksi selama 10 menit.

Tak ada pendalaman yang dilakukan masing-masing anggota yang hadir dalam rapat. Usai pemaparan, masing-masing perwakilan fraksi langsung diminta persetujuan soal usulan Adies.

Sebanyak delapan fraksi secara bulat menyetujui Adies sebagai calon hakim MK pengganti Arief. Usai penetapan, anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengungkap alasan rapat fit and proper test digelar secara singkat.

Arief Hidayat mulai pensiun hari ini, bertepatan dengan usianya yang genap 70 tahun.(*)

Polisi Selidiki Aksi Bom Molotov di Lingkungan SMP Sungai Raya Kalbar

Laporan: Amran

JAKARTA-Aksi pelemparan bom molotov terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/2).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.40 WIB. Personel dari Polres Kubu Raya pun segera mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Betul, sekitar pukul 10.40 WIB terjadi kejadian di SMPN 3 Sungai Raya. Saat ini tim Laboratorium Forensik Polda Kalbar dan Tim Inafis Polres Kubu Raya sedang melaksanakan olah tempat kejadian perkara,” kata Wakapolres Kubu Raya, Kopol An-dri Syahroni, kepada sejumlah wartawan di Sungai Raya, Selasa.

Ia mengatakan setelah kejadian, aparat kepolisian langsung bergerak

cepat mengamankan lokasi. Selain itu, polisi pun telah berhasil menangkap terduga pelaku untuk mencegah gangguan lanjutan.

Andri menyampaikan, terduga pelaku telah diamankan di Pos Sungai Raya dan kini menjalani pemeriksaan intensif.

“Yang diduga sebagai pelaku sudah kami amankan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini,” tu-

turnya.

Berdasarkan informasi awal, terduga pelaku diduga merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan motif maupun latar belakang aksi tersebut.

“Untuk sementara diduga salah satu siswa, namun kami masih dalam. Terkait apakah ini terorisme atau bukan, untuk saat ini tidak sampai ke situ,” katanya.

Sebelumnya,

Kasus Penganiayaan Banser, 4 Orang Jadi Tersangka Termasuk Bahar Smith

JAKARTA-Polisi menetapkan total empat tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Banser di Kota Tangerang, Banten. Dari keempat tersangka itu, salah satunya adalah Bahar bin Smith.

“Iya total empat tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Selasa (3/2).

Kendati demikian, Budi tak memberikan identitas tiga tersangka lainnya. Ia hanya menyebut ketiganya berada di dekat Bahar saat peristiwa penganiayaan tersebut.

Budi turut mengungkapkan keterlibatan Bahar dalam peristiwa dugaan penganiayaan itu terungkap dari keterangan ketiga tersangka.

“Jadi pertama ada tiga tersangka, lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Bahar) juga melakukan pemukulan. Sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terha-

dap Bahar Smith,” tutur dia.

Deret Kasus Bahar Smith, dari Hoaks Hingga Penganiayaan

Peran Bahar bin Smith di Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser

Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang, Banten.

“Kami sudah menetapkan tersangka dan mengirimkan panggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan pada Rabu, 4 Februari 2026,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, Minggu (1/2).

Dugaan penganiayaan itu terjadi pada 21 September 2025 di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Saat itu, Bahar menghadiri sebuah acara keagamaan.

Seorang anggota Banser yang datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah disebut sempat mendekat dan berniat bersalaman. Namun, korban diadang sekelompok orang yang mengawal kegiatan tersebut.

Korban kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diduga mengalami kekerasan fisik hingga mengalami luka-luka.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib pada 22 September 2025 dan terdaftar dengan nomor LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya.

Dalam perkara ini, Bahar dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.(*)



Polisi melakukan olah TKP pelemparan bom molotov di SMPN 3 Sungai Raya, Kubu Raya, Kalbar.

Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade menjelaskan, pelaku datang ke lingkungan sekolah dan melemparkan botol berisi bahan bakar yang memicu percikan api dan kepulan asap.

Beruntung, pihak sekolah bersama warga sekitar sigap melakukan penanganan awal sehingga api cepat dipadamkan dan tidak merambat ke bangunan utama maupun ruang kelas.

“Tidak ada korban jiwa. Situasi

berhasil dikendalikan dengan cepat,” kata dia.

Personel Polsek Sungai Raya langsung mengamankan lokasi, sementara Tim Inafis Satreskrim Polres Kubu Raya mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Polisi memastikan situasi keamanan di sekolah sudah terkendali dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan pengawasan aparat.

Wakapolres juga mengimbau mas-

yarakat, khususnya orang tua siswa dan guru, agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami minta masyarakat tetap tenang dan melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang beredar. Percaya akan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Nanti akan kami sampaikan secara lengkap setelah hasil penyelidikan dan laboratorium forensik keluar,” katanya.(*)

Pemkot Baubau Surati Menteri ESDM minta percepatan DPPU Bandara Betoambari



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Pemerintah Kota Baubau mengambil langkah strategis dengan mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk percepatan pembangunan Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU) di Bandara Betoambari. Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas penerbangan dan kebutuhan energi aviasi yang terus tumbuh di kawasan Kepulauan Buton.

Langkah percepatan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE usai bertemu dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (03/02/2026). Pertemuan tersebut menjadi titik penting bagi penguatan konektivitas udara yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama mobilitas masyarakat dan sektor ekonomi di wilayah Baubau.

Yusran menegaskan bahwa permohonan pembangunan DPPU merupakan bagian dari upaya mempercepat kapasitas pelayanan Bandara Betoambari yang semakin membutuhkan dukungan infrastruktur energi.

DPPU ini mendesak. Tanpa fasilitas pengisian bahan bakar, bandara kita tidak bisa berkembang optimal,” tegasnya.

Dalam surat bernomor 600.1/659/SETDA yang dikirimkan kepada Menteri ESDM, Pemkot Baubau menjelaskan bahwa kebutuhan avtur di Bandara Betoambari kini mencapai rata-rata 3.500 liter per hari. Jumlah tersebut meningkat signifikan setelah maskapai Super Air Jet mulai beroperasi rutin setiap hari dan meningkatkan volume penerbangan.

Absennya DPPU membuat maskapai harus menerapkan praktik tankering, yaitu membawa bahan bakar berlebih dari bandara asal. Praktik ini membuat pesawat mengurangi kapasitas angkut penumpang maupun bagasi demi menyesuaikan beban total pesawat. “Jika situasi ini dibiarkan, konektivitas udara di kawasan Kepulauan Buton terancam tidak berkelanjutan,” ujar Yusran.

Pembangunan DPPU juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi wilayah yang semakin relevan dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional. Kawasan Baubau yang menjadi pintu masuk aktivitas perdagangan dan pariwisata sangat

bergantung pada kelancaran layanan penerbangan.

Dalam skala nasional, pengembangan DPPU pernah menjadi faktor penting dalam perkembangan beberapa bandara besar di Indonesia, seperti Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Kehadiran DPPU terbukti mempercepat pembukaan rute baru, mendorong investasi, serta meningkatkan frekuensi penerbangan di kawasan timur Indonesia.

Secara global, penerapan fasilitas bahan bakar pesawat menjadi indikator kesiapan bandara untuk bersaing di jaringan transportasi udara internasional. Bandara kecil di negara seperti Filipina dan Malaysia menunjukkan peningkatan trafik hingga 40 persen setelah memiliki DPPU yang beroperasi penuh dalam kurun dua tahun.

Pemkot Baubau optimistis bahwa kehadiran DPPU akan menjadi magnet bagi maskapai lain untuk membuka rute baru, termasuk rute penghubung antar-kepulauan di Indonesia timur. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan pariwisata dan mempercepat pergerakan logistik di kawasan hinterland.

“Ini bukan hanya soal teknis penyediaan avtur, tetapi fondasi bagi transformasi Bandara Betoambari agar kompetitif dan mandiri secara energi,” tambah Yusran. Ia menegaskan bahwa Pemkot Baubau siap mendukung seluruh proses administratif dan koordinasi lintas lembaga yang dibutuhkan.

Dengan dukungan surat resmi dari pemerintah daerah, Pemkot Baubau berharap Kementerian ESDM segera memulai langkah-langkah prosedural terkait pembangunan DPPU, termasuk verifikasi teknis, penilaian kebutuhan fasilitas, hingga penyusunan jadwal implementasi pembangunan.

Pemerintah Kota Baubau menilai percepatan infrastruktur energi udara ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan wilayah. Selain memperkuat pelayanan publik, kehadiran DPPU akan menciptakan multiplier effect terhadap perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat.

“{Harapan kami, pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan DPPU secepatnya. Dampaknya besar bagi perekonomian Baubau dan wilayah Kepulauan Buton,” pungkas Wali Kota.(*)



tainer dan produk turunan dari sektor pertanian maupun perikanan.

Menurut Wawali Hamsinah Bolu, munculnya fasilitas ekspor langsung dari Baubau dan Kendari merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kontribusi daerah terhadap perputaran perdagangan global. “Peluangnya sangat terbuka. Saya berharap pelaku usaha di Baubau tidak hanya menonton, tetapi ikut menjadi bagian dari rantai ekspor,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sangat penting agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar. Dengan semakin mudahnya akses ekspor, pelaku usaha muda diminta untuk mempelajari mekanisme dan standar perdagangan internasional yang saat ini makin kompetitif.

Sejumlah pengusaha dari luar daerah mulai melirik potensi Baubau setelah peluncuran ekspor perdana tersebut. Kondisi ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kota itu memiliki daya tarik logistik yang kini semakin kuat. “Setelah peluncuran di Kendari, sudah banyak yang melihat potensi Baubau. Ini kabar baik bagi kita semua,” tuturnya.

Hamsinah Bolu juga menekankan pentingnya membangun kembali jejaring ekosistem

usaha, terutama dengan para pengumpul lokal yang selama ini mengirim barang ke Makassar dan Surabaya. Ia berharap seluruh rantai distribusi dapat bersatu dalam satu jalur ekspor langsung agar daya tawar produk daerah semakin tinggi.

“Kita punya potensi besar seperti Triko di Pasarwajo. Pelaku di setiap level sudah tersedia. Mudah-mudahan akses ekspor langsung ini membuat kita semakin kuat dan maju bersama,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui pengelolaan ekspor melalui Perusahaan Daerah (Perusda) bukan pekerjaan sederhana. Diperlukan tata kelola yang akuntabel karena menyangkut aset publik. Ia menilai pemerintah Baubau terus melakukan pembelajaran untuk memperkuat institusi tersebut. “Perusda ini bukan perusahaan pribadi. Kita harus mengawal bersama agar tetap berada di jalur yang benar,” ungkapnya.

Secara historis, Indonesia telah mengalami perkembangan penting dalam sektor ekspor sejak era deregulasi perdagangan tahun 1980-an yang membuka pintu bagi peningkatan komoditas non-migas. Pada level global, penguatan arus perdagangan internasional meningkat pesat sejak adopsi Kesepakatan Umum Tarif dan Perda-

gangan (GATT) menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, membuka lebih banyak peluang bagi daerah seperti Baubau untuk masuk ke pasar global melalui jalur logistik modern.

Di tingkat regional, Sulawesi Tenggara sejak awal 2000-an dikenal sebagai wilayah kaya potensi nikel dan perikanan, namun belum memiliki fasilitas ekspor langsung yang memadai. Dengan hadirnya terminal peti kemas dan jalur ekspor baru, Baubau dan Kendari kini berada pada fase transisi menuju pusat aktivitas perdagangan internasional yang lebih terstruktur.

Upaya memperkuat ekspor ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong hilirisasi mineral dan diversifikasi produk unggulan daerah. Pemerintah daerah Baubau menilai keterlibatan warga setempat akan menciptakan efek ekonomi berlipat, termasuk pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan PAD, serta munculnya pelaku usaha baru berbasis ekspor.

Dengan semakin luasnya akses pasar dan peluang kolaborasi, pemerintah kota berharap ekosistem usaha di Baubau mampu berkembang secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun global.(*)

Baubau Dorong Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal di Jalur Ekspor Langsung

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Upaya membuka akses pasar internasional di Sulawesi Tenggara kembali mendapat momentum baru setelah pemerin-

tah daerah Baubau mendorong pelaku usaha lokal terlibat sebagai eksportir langsung. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., usai

menghadiri peluncuran ekspor perdana komoditas ke Tiongkok di Terminal Petikemas Kendari New Port Bungkutoko, Rabu sore (28/01/2026).

Peluncuran ekspor itu diresmikan

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM. Berbagai komoditas dikirim melalui fasilitas ekspor langsung, termasuk ferro nikel sebanyak 46 kon-